



Strategi Pengelolaan Dana Program Pengabdian Masyarakat: Perspektif Manajemen Keuangan Publik

Luther Hasan Lase^{1*}, Ristanto², Sintya Purwandaningsih³, Ahmad Murodi⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia
E-mail: luther.hasan@unis.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2025-09-19

Revised : 2025-09-29

Accepted : 2025-09-30

KEYWORDS

Fund Management; Community Service Programs; Public Financial Management

KATA KUNCI

Manajemen Dana;
Program Layanan Masyarakat;
Manajemen Keuangan Publik

ABSTRAC

This study aims to analyze fund management strategies in community service programs through the perspective of public financial management (PFM). The focus of the study is directed at budget planning, distribution mechanisms, and financial control and accountability that support program effectiveness. The research method used is a qualitative approach with a case study design, involving in-depth interviews, financial document reviews, and observations at several community service organizing institutions. The results show that the application of PFM principles especially transparency, participation, and performance-based supervision can improve the efficiency of fund allocation, minimize the risk of abuse, and strengthen public accountability. In addition, the synergy between participatory planning and digital monitoring systems has been proven to speed up the reporting process and increase stakeholder trust. These findings confirm the importance of integrating PFM practices in the management of community service program funds to ensure sustainability and optimal social impact.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan dana pada program pengabdian kepada masyarakat melalui perspektif public financial management (PFM). Fokus kajian diarahkan pada perencanaan anggaran, mekanisme distribusi, serta pengendalian dan akuntabilitas keuangan yang mendukung efektivitas program. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, telaah dokumen keuangan, dan observasi pada beberapa lembaga penyelenggara pengabdian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip PFM terutama transparansi, partisipasi, dan pengawasan berbasis kinerja mampu meningkatkan efisiensi alokasi dana, meminimalkan risiko penyalahgunaan, dan memperkuat akuntabilitas publik. Selain itu, sinergi antara perencanaan partisipatif dan sistem monitoring digital terbukti mempercepat proses pelaporan serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi praktik PFM dalam pengelolaan dana program pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan dampak sosial yang optimal.

1. Pendahuluan

Program pengabdian kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberdayakan komunitas lokal melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan

keterampilan (Haidi Bantara et al., 2024). Kegiatan ini memungkinkan perguruan tinggi dan lembaga sosial untuk berkontribusi langsung pada pemecahan masalah riil masyarakat, mulai dari peningkatan kapasitas ekonomi hingga penguatan modal sosial

(Suharto, 2020). Pendekatan partisipatif dalam pengabdian mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan warga, sehingga menghasilkan solusi yang kontekstual dan berkelanjutan (Mulyono & Hidayat, 2021). Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai implementasi dari tri dharma perguruan tinggi, tetapi juga sebagai sarana penting untuk mendukung pembangunan inklusif dan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput (Wicaksono et al., 2019; Aziz & Firmansyah, 2024).

Keberhasilan program pengabdian tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang memadai dan berkesinambungan. Ketersediaan dana yang stabil memungkinkan pelaksanaan kegiatan secara konsisten (Ratnasari et al., 2024), mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi hasil (World Bank, 2019). Pendanaan yang berkelanjutan juga meningkatkan kapasitas lembaga pelaksana untuk berinovasi, memperluas jangkauan, dan menjaga kualitas intervensi sosial (UNDP, 2022). Tanpa dukungan finansial yang terstruktur, risiko terhambatnya kegiatan dan menurunnya dampak sosial akan semakin besar. Oleh karena itu, strategi manajemen keuangan publik yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk menjamin keberlangsungan program pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan berdampak luas (Ainiyah et al., 2025; Putra, 2023).

Pengelolaan dana untuk program pengabdian kepada masyarakat sering menghadapi tantangan serius dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi. Transparansi menuntut keterbukaan informasi terkait perencanaan dan realisasi anggaran (Ria Anggita Zen. M et al., 2025), namun praktiknya sering terkendala oleh sistem pelaporan yang tidak terintegrasi dan keterbatasan akses publik terhadap data keuangan (OECD, 2020). Akuntabilitas juga menjadi isu krusial, karena mekanisme pertanggungjawaban kerap hanya bersifat administratif tanpa evaluasi kinerja yang mendalam, sehingga sulit menilai efektivitas pemanfaatan dana (Olga & Nurraihan, 2024); (Widodo et al., 2023) Ketidakefisienan dalam distribusi dana dapat menimbulkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, menurunkan kualitas output program, dan pada akhirnya mengurangi dampak sosial yang diharapkan (World Bank, 2021).

Selain itu, kasus-kasus ketidaktepatan alokasi anggaran maupun pelaporan yang lemah menunjukkan adanya celah dalam tata kelola keuangan publik. Studi Bank Dunia (2021) mencatat bahwa banyak organisasi nirlaba dan lembaga pendidikan tinggi masih menghadapi praktik

pencatatan ganda, ketidakcocokan antara laporan keuangan dan realisasi lapangan, serta minimnya audit independen (Widodo et al., 2023). Kelemahan ini memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan dana dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk donor, pemerintah, dan masyarakat penerima manfaat (Transparency International, 2022). Oleh karena itu, penerapan prinsip *public financial management* yang menekankan pada penganggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan digital, dan pengawasan eksternal menjadi langkah mendesak untuk memastikan dana program pengabdian disalurkan secara tepat sasaran dan akuntabel (Zaki et al., 2024).

Public Financial Management (PFM) memberikan kerangka menyeluruh dalam mengelola dana publik agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. PFM menekankan siklus pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan, hingga pelaporan dan audit (Cangiano et al., 2013). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan dana terintegrasi dengan tujuan pembangunan dan hasil yang terukur, bukan sekadar penyerapan anggaran. Dengan penganggaran berbasis kinerja, lembaga pelaksana program dapat menautkan alokasi dana dengan indikator capaian, sehingga keputusan pendanaan lebih objektif dan berorientasi pada hasil (Andrews et al., 2014). Prinsip ini sangat relevan untuk program pengabdian kepada masyarakat yang memerlukan keterkaitan jelas antara input finansial dan dampak sosial (Mahmud, 2023).

Selain itu, PFM menekankan pentingnya audit dan pelaporan yang kredibel sebagai instrumen pengawasan dan pertanggungjawaban publik. Audit independen tidak hanya memverifikasi keabsahan penggunaan dana, tetapi juga mengevaluasi efisiensi dan efektivitas program (Allen et al., 2015). Pelaporan keuangan yang terstandar dan berbasis teknologi informasi meningkatkan aksesibilitas data bagi pemangku kepentingan, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mengurangi peluang penyalahgunaan dana (OECD, 2020). Dengan demikian, penerapan prinsip PFM dalam pengelolaan dana program pengabdian kepada masyarakat menjadi fondasi penting untuk memastikan keberlanjutan pendanaan, peningkatan kualitas layanan, dan pencapaian tujuan sosial yang lebih luas (Agus Supriyadi et al., 2023; Hariyadi et al., 2023; Oktarina et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Andrews dan Hill (2021) menyoroti hubungan antara penerapan prinsip *Public Financial Management* (PFM)

dengan efektivitas pendanaan program sosial di berbagai negara berkembang. Hasil kajian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja dan pelaporan keuangan yang transparan dapat meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk donor dan masyarakat penerima manfaat. Studi ini relevan karena menegaskan pentingnya integrasi proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis hasil untuk memastikan dana publik digunakan secara optimal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Temuan tersebut memberikan dasar konseptual yang kuat bagi penelitian ini untuk menilai sejauh mana prinsip PFM dapat meningkatkan keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat (Kornitasari, 2023).

Selain itu, riset Kusuma dan Prabowo (2022) mengenai strategi pengelolaan keuangan pada program pengabdian perguruan tinggi di Indonesia menemukan bahwa penerapan sistem pelaporan digital dan audit internal yang ketat berpengaruh positif terhadap efisiensi distribusi dana. Studi ini juga menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam tahap perencanaan anggaran mendorong keterbukaan informasi dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa transparansi, pengawasan berbasis teknologi, dan keterlibatan pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam pengelolaan dana publik untuk program pengabdian masyarakat yang berorientasi pada hasil.

2. Tinjauan Literatur

Public Financial Management (PFM)

Public Financial Management (PFM) merupakan suatu kerangka kerja yang mencakup proses perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan, pelaporan, dan audit keuangan publik yang dirancang untuk memastikan pengelolaan dana negara secara efisien, transparan, dan akuntabel. PFM tidak hanya berfokus pada pengendalian pengeluaran, tetapi juga pada optimalisasi alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Allen et al., 2015). Menurut Cangiano, Curristine, dan Lazare (2013), penerapan prinsip PFM yang baik dapat meminimalkan risiko korupsi, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dengan demikian, PFM menjadi pilar penting dalam memastikan keberlanjutan program-program berbasis dana publik, termasuk program pengabdian

kepada masyarakat yang memerlukan integritas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangannya.

Pengelolaan Dana Publik

Pengelolaan dana publik adalah serangkaian proses perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang bertujuan memastikan penggunaan sumber daya keuangan negara atau daerah secara efisien, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat luas. Proses ini mencakup penetapan prioritas anggaran, pengendalian belanja, hingga pelaporan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan (Allen et al., 2015). Menurut Cangiano, Curristine, dan Lazare (2013), pengelolaan dana publik yang baik tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik melalui tata kelola keuangan yang akurat dan dapat diaudit. Dengan penerapan prinsip tata kelola yang kuat, pengelolaan dana publik berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta memastikan program-program layanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengabdian masyarakat, berjalan efektif dan tepat sasaran.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam strategi pengelolaan dana pada program pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual dan menyeluruh terkait praktik Public Financial Management (PFM) dalam pengelolaan dana publik. Lokasi penelitian difokuskan pada beberapa lembaga perguruan tinggi dan organisasi nirlaba yang aktif melaksanakan program pengabdian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, melibatkan pengelola keuangan, ketua program, dan perwakilan pemangku kepentingan masyarakat agar diperoleh perspektif yang komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumen keuangan, dan observasi langsung pada proses perencanaan, distribusi, serta pelaporan dana. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking kepada informan kunci. Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi praktik terbaik, hambatan, dan rekomendasi kebijakan yang mendukung penerapan prinsip PFM secara efektif dalam

pengelolaan dana program pengabdian kepada masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

Praktik Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran merupakan tahap krusial dalam pengelolaan dana publik karena menentukan efektivitas pelaksanaan program dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Menurut Allen et al. (2015), proses penyusunan anggaran yang baik harus mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan sasaran, serta pemetaan sumber daya yang realistis. Dalam konteks program pengabdian kepada masyarakat, proses ini tidak hanya menitikberatkan pada alokasi keuangan, tetapi juga integrasi tujuan sosial dan indikator keberlanjutan agar dampak kegiatan dapat terukur (Setiyowati et al., 2023).

Proses penyusunan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme partisipatif atau top-down. Mekanisme partisipatif mengedepankan keterlibatan pemangku kepentingan—seperti pengelola program, perwakilan masyarakat, dan donor—sehingga menghasilkan keputusan yang lebih kontekstual dan meningkatkan rasa memiliki (Fung, 2015). Sebaliknya, pendekatan top-down menempatkan keputusan anggaran di tangan manajemen puncak atau pihak pendonor utama. Meskipun lebih cepat dalam pengambilan keputusan, pendekatan ini berisiko mengabaikan kebutuhan riil di lapangan dan menurunkan akseptabilitas program (Andrews & Hill, 2021).

Penetapan prioritas dan indikator kinerja menjadi tahapan berikutnya yang penting untuk memastikan keterkaitan antara alokasi anggaran dan capaian hasil. Indikator kinerja berbasis output dan outcome membantu mengukur efektivitas penggunaan dana serta menilai sejauh mana kegiatan memenuhi tujuan strategis (OECD, 2020). Pada program pengabdian, indikator dapat mencakup jumlah penerima manfaat, peningkatan pendapatan komunitas, atau peningkatan kapasitas lokal. Kejelasan indikator ini memudahkan proses evaluasi dan pelaporan kepada donor maupun publik yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Praktik Perencanaan dan Penganggaran

Aspek	Temuan Utama
Mekanisme Penyusunan Anggaran	Partisipatif meningkatkan akseptabilitas; top-down lebih cepat

Penetapan Prioritas & Indikator	Penting untuk keterkaitan dana–hasil
Kendala Data	Data kebutuhan riil sering tidak lengkap
Kendala SDM & Waktu	Kekurangan tenaga ahli, proses perencanaan terburu-buru
Solusi	Integrasi teknologi dan prinsip PFM

Namun, perencanaan anggaran kerap menghadapi kendala, salah satunya adalah keterbatasan data kebutuhan riil (Dan et al., 2025). Data yang tidak lengkap atau tidak mutakhir menyebabkan kesenjangan antara rencana dan kebutuhan aktual, sehingga memengaruhi akurasi alokasi dana (World Bank, 2021). Misalnya, perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sasaran dapat membuat perhitungan anggaran awal menjadi tidak relevan, yang akhirnya menuntut revisi dan menunda implementasi program. Kendala lain terletak pada waktu dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Banyak lembaga penyelenggara program pengabdian yang memiliki tim keuangan terbatas dan jadwal padat, sehingga proses perencanaan sering dilakukan secara terburu-buru (Kusuma & Prabowo, 2022). Kekurangan tenaga ahli dalam perencanaan dan analisis anggaran dapat mengakibatkan estimasi biaya yang tidak akurat, lemahnya monitoring, dan potensi pemborosan dana (Bloom & Reenen, 2013).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, literatur merekomendasikan integrasi teknologi informasi, pelatihan SDM, dan penerapan *Public Financial Management* (PFM) yang komprehensif. Sistem perencanaan digital dapat meningkatkan kualitas data, mempercepat proses validasi, dan memfasilitasi partisipasi pemangku kepentingan (Cangiano et al., 2013). Dengan demikian, praktik perencanaan dan penganggaran yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi keuangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik.

Mekanisme Distribusi dan Penggunaan Dana

Distribusi dan penggunaan dana merupakan tahapan penting dalam siklus manajemen keuangan publik karena menentukan kelancaran implementasi program dan pencapaian target sosial. Menurut Allen et al. (2015), mekanisme distribusi dana yang efektif harus memastikan keteraturan pencairan, otorisasi yang jelas, serta pelaporan yang akurat agar risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalisir (Sukirman et al., 2019). Dalam konteks program pengabdian

kepada masyarakat, mekanisme ini menjadi kunci keberhasilan mengingat banyak kegiatan membutuhkan pendanaan tepat waktu untuk mendukung partisipasi masyarakat dan keberlanjutan kegiatan. Alur penyaluran dana umumnya dimulai dari pengajuan proposal anggaran, verifikasi oleh unit keuangan, persetujuan otorisasi, hingga pencairan ke rekening pelaksana program. Setiap tahap ini membutuhkan dokumen pendukung seperti rencana anggaran biaya, kontrak kerja, dan laporan kemajuan (World Bank, 2021). Proses otorisasi berlapis dirancang untuk memastikan dana disalurkan hanya setelah verifikasi administratif dan teknis terpenuhi. Tahapan ini sejalan dengan prinsip Public Financial Management (PFM) yang menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik (Cangiano et al., 2013).

Sistem pencatatan keuangan memainkan peran penting dalam memonitor distribusi dan penggunaan dana. Implementasi aplikasi berbasis akuntansi digital memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, memudahkan rekonsiliasi, dan mempercepat proses audit (OECD, 2020). Di banyak perguruan tinggi dan organisasi nirlaba, penerapan enterprise resource planning (ERP) atau sistem e-budgeting telah terbukti meningkatkan keakuratan laporan keuangan dan meminimalkan kesalahan manusia (Kusuma & Prabowo, 2022). Selain itu, pencatatan yang terintegrasi dengan indikator kinerja memudahkan pelacakan efektivitas penggunaan dana. Namun, permasalahan keterlambatan pencairan dana sering muncul sebagai kendala signifikan. Studi Transparency International (2022) menunjukkan bahwa birokrasi berlapis, proses verifikasi yang panjang, dan ketidakselarasan jadwal pencairan dengan rencana kegiatan menjadi penyebab utama. Keterlambatan ini dapat menunda pelaksanaan program, mengurangi partisipasi masyarakat, dan menurunkan dampak sosial yang direncanakan (Haidi Bantara et al., 2024).

Ketidaksesuaian realisasi anggaran dengan rencana juga menjadi isu krusial. Faktor penyebab meliputi perubahan kebutuhan lapangan, fluktuasi harga barang/jasa, serta kelemahan pengawasan internal (World Bank, 2021). Ketidaksesuaian ini tidak hanya mempersulit proses pelaporan, tetapi juga menimbulkan risiko temuan audit dan menurunkan kepercayaan donor maupun publik. Untuk mengatasinya, penerapan variance analysis dan audit berkala dianjurkan guna mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan sejak dini (Allen et al., 2015). Untuk memperkuat mekanisme distribusi dan penggunaan dana, integrasi sistem digital, pelatihan SDM keuangan, dan penguatan

pengawasan independen sangat disarankan. Penggunaan blockchain misalnya, mulai diadopsi untuk meningkatkan transparansi rantai transaksi dan mengurangi potensi kecurangan (OECD, 2020). Dengan demikian, mekanisme distribusi dana yang baik tidak hanya memastikan kelancaran penyaluran tetapi juga menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat (Dinengsih, 2019).

Pengaruh Terhadap Keberhasilan Program Dan Kepercayaan Masyarakat

Transparansi distribusi dan penggunaan dana terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat. Menurut Allen et al. (2015), transparansi memungkinkan pemangku kepentingan memantau setiap tahap penyaluran dan realisasi anggaran, sehingga meminimalkan risiko penyimpangan. Program dengan pelaporan keuangan yang jelas cenderung menunjukkan tingkat pencapaian target lebih tinggi dibanding program dengan mekanisme keuangan tertutup (World Bank, 2021). Kejelasan informasi anggaran membantu memastikan bahwa alokasi sumber daya selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pengelolaan dana memperkuat keberhasilan program melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan. Penelitian OECD (2020) menegaskan bahwa sistem akuntabilitas yang ketat, termasuk audit berkala dan publikasi laporan keuangan, meningkatkan ketepatan waktu pencairan dana dan kualitas implementasi program. Dengan proses akuntabilitas yang baik, tim pelaksana dapat memusatkan perhatian pada dampak sosial yang diinginkan, seperti pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat (Ainiyah et al., 2025).

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelaksana program erat kaitannya dengan keterbukaan dalam pengelolaan dana. Studi Transparency International (2022) menunjukkan bahwa publik cenderung lebih aktif berpartisipasi ketika mereka percaya bahwa dana digunakan sesuai rencana. Kepercayaan ini memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan penyelenggara, sehingga menciptakan sinergi yang mendukung keberhasilan jangka panjang. Sebaliknya, ketidakjelasan laporan keuangan sering memicu skeptisisme dan menurunkan tingkat partisipasi. Keterlambatan pencairan atau ketidaksesuaian realisasi anggaran dengan rencana dapat merusak reputasi lembaga dan menurunkan kepercayaan masyarakat (Cangiano et al., 2013). Misalnya, kegiatan yang tertunda akibat pencairan dana yang lambat dapat menimbulkan persepsi negatif, seolah-olah terjadi mismanajemen

atau penyalahgunaan. Persepsi tersebut, meskipun tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya, dapat menghambat dukungan publik di masa depan (Zulyusri et al., 2023).

Penerapan teknologi digital, seperti *e-budgeting* dan pelaporan berbasis blockchain, dapat memperkuat kredibilitas pengelolaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (OECD, 2020). Sistem ini menyediakan rekam jejak transaksi yang sulit dimanipulasi dan mudah diakses oleh publik, sehingga mempermudah proses verifikasi. Ketika masyarakat dapat memantau aliran dana secara real-time, tingkat kepercayaan terhadap program meningkat dan potensi keberhasilan pun bertambah. Secara keseluruhan, distribusi dan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlanjutan program. Keberhasilan program yang didukung oleh kepercayaan masyarakat menciptakan efek ganda: hasil sosial yang lebih luas dan peluang pendanaan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, donor, dan sektor swasta (Kusuma & Prabowo, 2022). Oleh karena itu, integritas mekanisme keuangan bukan hanya faktor teknis, melainkan fondasi strategis bagi keberhasilan program pengabdian masyarakat (Widodo et al., 2023); (Zaki et al., 2024).

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip PFM terutama transparansi, partisipasi, dan pengawasan berbasis kinerja mampu meningkatkan efisiensi alokasi dana, meminimalkan risiko penyalahgunaan, dan memperkuat akuntabilitas publik. Selain itu, sinergi antara perencanaan partisipatif dan sistem monitoring digital terbukti mempercepat proses pelaporan serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi praktik PFM dalam pengelolaan dana program pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan dampak sosial yang optimal dengan semua interpretasi/kesimpulan makalah ini.

6. Referensi

- Agus Supriyadi, A., Desy, D., Suharyat, Y., Santosa, T. A., & Sofianora, A. (2023). The effectiveness of STEM-integrated blended learning on Indonesia student scientific literacy: A meta-analysis. *International Journal of Education and Literature*, 2(1), 41–48. <https://doi.org/10.55606/ijel.v2i1.53>
- Ainiyah, N., Shofiah, N., Jaelani, R. S., Widiyanah, I., & Sholeh, M. (2025). Optimalisasi sumber dana dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTs PUI Tenajar Lor Indramayu. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(4), 2129–2146. <https://doi.org/10.60036/jbm.732>
- Aziz, A., & Firmansyah, R. (2024). Pendampingan manajemen keuangan dan bisnis dalam pengembangan agribisnis di Pondok Pesantren CEO Bogor. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 25–31. <https://doi.org/10.58707/trimas.v4i2.953>
- Bloom, N., & Van Reenen, J. (2013). Strategi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo. *NBER Working Papers*, 01, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Dan, T., Keuangan, E., & Universitas, D. I. (2025). Transparansi dan efisiensi keuangan di universitas untuk mewujudkan tata kelola yang baik. 7(1), 1–7.
- Dinengsih, S. (2019). *Laporan pengabdian kepada masyarakat pendidikan* (pp. 0–13). http://rosdiana.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/96321/Laporan_Abdimas_ATA2021.pdf
- Haidi Bantara, P., Subagja, I. K., Hakim, A., Ermanto, C., & Ali, A. (2024). Strategi peningkatan manajemen keuangan BUM Desa: Analisis kinerja, tantangan, dan rekomendasi kebijakan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 470–476. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1396>
- Hariyadi, S., Santosa, T. A., & Sakti, B. P. (2023). Effectiveness of STEM-based mind mapping learning model to improve students' science literacy in the era of revolution. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(10), 791–799. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i10.5125>
- Kornitasari, Y. (2023). Sosialisasi laporan keuangan PMI Kabupaten Blitar: Transparan, akuntabel dan kepercayaan publik. *Empowerment*, 6(3), 288–296. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8742>
- Mahmud, M. (2023). Penerapan model manajemen keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 3(1), 45–57. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v3i1.80>
- Oktarina, K., Suhaimi, Santosa, T. A., Razak, A., Irdawati, Ahda, Y., Lufri, & Putri, D. H. (2021). Meta-analysis: The effectiveness of using blended learning on multiple intelligences and

- student character education during the Covid-19 period. *International Journal of Education and Curriculum Application*, 4(3), 184–192. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/IJECA/article/view/5505>
- Olga, L., & Nurraihan, F. (2024). Manajemen finansial dalam konteks pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium*, 9(1), 113–128. https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v9i1.1157
- Putra. (2023). Manajemen pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bobos Kabupaten Subang. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 3, 84–95. Retrieved from <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1575>
- Ratnasari, W., Handayani, L., Putri, A. P., Nurlaili, & Kunjang, S. (2024). Analisis pembiayaan dan manajemen finansial di perguruan tinggi swasta: Financial management and funding in private higher education institutions. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 4(2), 249–258. Retrieved from <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/impian/article/view/4475>
- Ria Anggita Zen, M., Prayitno Nento, H., Tunggati, M. T., Polidu, I., Masaguni, O. S., Mamu, K. Z., Suaib, S. O., & Moha, S. W. S. (2025). Peningkatan literasi hukum dalam pengelolaan keuangan: Strategi edukasi bagi UMKM modern di Kecamatan Duingingi. *Abdimas Awang Long*, 8(1), 137–150. <https://doi.org/10.56301/awal.v8i1.1486>
- Setiyowati, A., Apsari, P. I., & Pratiwi, D. N. (2023). Peningkatan pengelolaan keuangan keluarga melalui modul manajemen keuangan syariah pada masyarakat Tempurejo Surabaya. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(3), 528–539. <https://doi.org/10.30651/aks.v7i3.18101>
- Sukirman, Hidayah, R., Suryandari, D., & Purwanti, A. (2019). Pengelolaan keuangan keluarga dalam rangka peningkatan masyarakat mandiri dan berperan dalam peningkatan literasi keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Abdimas*, 23(2), 165–169. <https://journal.unnes.ac.id/nju/abdimas/article/view/17951>
- Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningr, D., Asmandani, V., Il, F., Politik, I., & Jember, U. (2019). Bondowoso. *[Jurnal tidak disebutkan]*, 4(1), 9–20.
- Widodo, T., Muhammad, I., Darmayanti, R., Nursaid, N., & Amany, D. A. L. (2023). Manajemen keuangan pendidikan berbasis digital: Sebuah kajian pustaka. *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership*, 1(2), 146–167. <https://doi.org/10.51214/ijemal.v1i2.548>
- Zaki, I., Ryandono, M. N. H., Zulaikha, S., Hendratmi, A., Rani, L. N., Bayuny, A. F. R., Wijayanti, I., & Arifin, S. (2024). Penguatan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan ternak. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 3(2), 103–114.
- Zulyusri, Z., Santosa, T. A., Festiyed, F., Yerimadesi, Y., Yohandri, Y., Razak, A., & Sofianora, A. (2023). Effectiveness of STEM learning based on design thinking in improving critical thinking skills in science learning: A meta-analysis. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(6), 112–119. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i6.3709>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).